

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH JAKSA TERHADAP
NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN
PEMBEBASAN BERSYARAT DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Oleh:

FATIA NABILA IVANA

UNIV 2010111038 ALAS

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum

Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg: 27/PK-IV/V/2024

	No. Alumni Universitas	Fatia Nabila Ivana	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang, 20 Juni 2002 b. Nama Orang Tua : Rico Setia Budi & Leni Marlina c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2010111038	f. Tanggal Lulus : 14 November 2024 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 3 Bulan i. IPK : 3,83 j. Alamat : Jln. Bungo Indah II No. 14, Bukittinggi	

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH JAKSA TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI

(Fatia Nabila Ivana, 2010111038, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 69 halaman + ix, 2024)

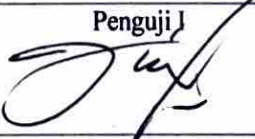

ABSTRAK

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang Pidana, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta tugas dan wewenang untuk ketertiban dan ketentraman umum. Salah satu tugas dari jaksa adalah melaksanakan pengawasan terhadap keputusan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu syarat narapidana dapat memperoleh keputusan pembebasan bersyarat ialah "Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat." Pada pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan oleh jaksa untuk memastikan narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat dapat dibina kembali dan diamati ketika berada di tengah masyarakat. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi? 2. Kendala apakah yang dihadapi oleh jaksa dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi? 3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam pengawasan narapidana pembebasan bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bukittinggi?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Untuk data yang diperlukan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dari studi terhadap dokumen dan wawancara di Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bukittinggi, dan Balai Pemasarakatan Kelas II Bukittinggi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat pada saat ini hanya dilaksanakan dengan pengawasan secara administrasi saja dan pelaksanaan pengawasan tersebut juga belum terlaksana secara optimal. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan ini disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya faktor internal yaitu adanya kendala administrasi, kendala Prosedur Operasional Strandar (SOP), kendala sarana dan prasarana, dan tidak adanya kesadaran narapidana, serta faktor eksternal yaitu adanya kendala koordinasi antar instansi dan kendala lingkungan luar. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah melaksanakan koordinasi yang baik dengan instansi yang berkaitan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh keputusan pembebasan bersyarat.

Kata Kunci: Pengawasan, Pembebasan Bersyarat, Kejaksaan

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 14 November 2024.

Penguji,

Tanda Tangan		Penguji I		Penguji II
Nama Terang	Iwan Kurniawan, S.H., M.H		Riki Afrizal, S.H., M.H	

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:



No. University Alumni	Fatia Nabila Ivana	No. Faculty Alumni
a. Place/Date of Birth : Padang, June 20 2002	f. Graduation Date : 14 November 2024	
b. Parents Name : Rico Setia Budi & Leni Marlina	g. Predicate : With Honours	
c. Faculty : Law	h. Length of Study : 4 Years 3 Month	
d. Concentration : Criminal Law	i. GPA : 3, 83	
e. No. BP : 2010111038	j. Adress : Bungo Indah II Street 14, Bukittinggi	

IMPLEMENTATION OF SUPERVISION BY PROSECUTORS OF PRISONERS WHO HAVE RECEIVED DECISIONS OF CONDITIONAL RELEASE IN THE JURISDICTION OF THE BUKITTINGGI DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE

(Fatia Nabila Ivana, 2010111038, Andalas University, Criminal Law, 69 Pages + ix, 2024)

ABSTRACT

The Prosecutor's Office is a government institution that exercises state power in the field of prosecution and other authorities based on law. The Prosecutor's Office has duties and authorities in the criminal, civil, and state administrative fields, as well as duties and authorities in the field of public order and security. One of the prosecutor's duties is to supervise parole decisions based on Article 30 paragraph (1) letter c of the Republic of Indonesia Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. In the Criminal Code (KUHP) in Article 15 paragraph (1) it is stated that one of the requirements for prisoners to receive a parole decision is "If the convict has served two-thirds of the length of the prison sentence imposed on him, at least nine months, then he can be subject to parole." In its implementation, supervision carried out by the prosecutor to ensure that prisoners who receive parole decisions can be re-educated and observed while in society. The formulation of the problem discussed in this thesis is: 1. How is the implementation of supervision by prosecutors of prisoners who receive parole decisions in the Bukittinggi District Prosecutor's Office Jurisdiction? 2. What obstacles do prosecutors face in supervising prisoners who have received parole decisions in the jurisdiction of the Bukittinggi District Attorney's Office? 3. How can we overcome the obstacles faced by prosecutors in supervising prisoners who have received parole decisions in the jurisdiction of the Bukittinggi District Attorney's Office?. This study uses an empirical legal research type with a descriptive analytical research nature. The data needed comes from primary data and secondary data taken from document studies and interviews at the Bukittinggi District Attorney's Office, Bukittinggi Class IIA Penitentiary, and Bukittinggi Class II Penitentiary. The results of the study indicate that the implementation of supervision by prosecutors of prisoners who have received parole decisions is currently only carried out with administrative supervision and the implementation of this supervision has not been carried out optimally. The less than optimal implementation of this supervision is caused by several obstacles, including internal factors, namely administrative obstacles, Standard Operating Procedure (SOP) obstacles, facility and infrastructure obstacles, and lack of prisoner awareness, as well as external factors, namely coordination obstacles between agencies and external environmental obstacles. Efforts made to overcome these obstacles are by coordinating well with related agencies in carrying out supervision of prisoners who have received parole decisions.

Keywords: Supervision, Parole, Prosecutor's Office

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by November, 14th 2024

Examiner,

Signature		
Name	Iwan Kurniawan, S.H., M.H	Riki Afrizal, S.H., M.H

Acquainted,

Head of the Departement of Criminal Law: **Riki Afrizal, S.H., M.H.**

Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University Under the Number:

	Faculty/University	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature:
No. Alumni University:	Name:	Signature: